ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Balthasar Malindar,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki, balthasar_malindar01@yahoo.com

ABSTRAK

„
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan pendapatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan data panel tahun 2010 – 2015. Penelitian ini menggunakan uji Huasman dalam memilih model terbaik untuk metode *General Last Square (GLS)* dan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa *Random Effects Model (REM)* yang digunakan dalam menganalisis faktor Determinan yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Berdasarkan hasil estimasi tersebut bahwa variabel Jumlah Penduduk (X1) berpengaruh positif 0,041754 dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten kota. Sedangkan variabel *Product Domestic Regional Brotu (X2)* berpengaruh negatif dan signifikan ,dengan nilai -1.4805 dan variabel pengeluaran pemerintah (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah.

Kata kunci :Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah

Pendahuluan

Pada mulanya upaya pembangunan diidentifikasi dengan upaya peningkatan pendapatan per capita atau disebut strategi

pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan mampu memecahkan permasalahan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan

melalui trickle down effect (Kuncoro, 2010: 4). Pada awal tahun 1960-an, sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mengalami tingkat pertumbuhan tinggi menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi semacam itu hanya memberikan sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan serta distribusi pendapatan (Arsyad, 2010: 280) permasalahan pembangunan saat ini terutama di NSB bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan distribusi

Tingkat lajur pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di propinsi Maluku didukung oleh sector – sector usaha yang berkembang di daerah. Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian. Memang bahwa sector – sector ekonomi yang mempunyai peranan besar dalam perekonomian di antar kabupaten yang berada pada propinsi Maluku dari tahun ketahun.

Berikut ini dapat ditampilkan data perkembangan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun 2010 – 2015 sebagai berikut

Tabel 1.1
Data Jumlah Jiwa, PDRB dan
Pengeluaran Pemerintah
Pada Kab. MTB, MARLA,
KEPULAUAN ARU, MBD dan Kota
Tual
Propinsi Maluku

Kabupaten	Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB	Pengeluaran Pemerintah
MTB	2010	105804	9.267643567	511 847 146
	2011	106768	9.84134441	582 478 491
	2013	107827	10.45590186	692 288 371
	2014	108665	10.90957199	945 532 470
	2015	109589	11.46146611	1 048 094 847

(Sumber BPS)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa adan kenaikan jumlah penduduk, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah dari tahun 2010 – 2015 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki Jumlah penduduk yang tertinggi pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 – 2015 dengan jumlah 108,665 dan 109,598 Jiwa, sedangkan kalau dilihat dari Pertumbuhan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Jumlah PDRB sebesar 10,909,571.99 dan 11,461,466.11 di tahun 2014 dan 2015. Kalau dilihat pada pengeluaran pemerintah antara Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada dua tahun terakhir yaitu kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan data pengeluaran Pemerinta sebesar 945 532 470 dan 1 048 094 847. Perbedaan data tersebut bukan

hanya terjadi pada dua Kabupaten ini saja, melainkan terjadi pada Kabupaten –

Kabupaten lainnya, ini dapat dilihat pada Tabel diatas.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di Negara – Negara berkembang. Sebagai ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut : economic development is growth plus change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan –perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi misalnya usaha merombak sector pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan (Sukirno, 2006: 415).

Teori Populasi Penduduk

Ada pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi

dimana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembang usaha ekonomi. Penduduk disatu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi – kondisi kependudukan, data informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis – jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa.

Dipihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi social ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam perhitungan beberapa penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasarbagi suatu produk usaha tertentu (Todaro,2003).

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, besarnya jumlah penduduk dan kekuatan

ekonomi masyarakat menjadi potensi sekaligus sasaran pembangunan sosial ekonomi, baik untuk skala nasional baikpun internasional. Berdasarkan hal ini pembangunan sumber daya manusia perlu terus diingkatkan agar kualitas penduduk sebagai pelaku ekonomi dapat meningkat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan zaman yang terus berkembang.

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa – bangsa. Alasannya alam (tanah) tidak ada arti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelolah sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik dari

Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemulaan pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi bertumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Sesudah Adam Smith Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pembangunan pemikiran – pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah *Principles Of Populaltion*. Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikiran sejalan dengan Smith. Disitu disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagiannk kerja dan spesialisasi. Sebaliknya Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah bagi pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan,

pabrik-pabrik dan bangunan lainnya serta pembuuatan jalan. Memnurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan prooduksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan manusia. Sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral.

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang didasarkan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya termasuk, tenaga kerja, akan digunakan secara penuh. Dengan demikian bahwa sistem yang didasarkan pada bahwa tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, dari pada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan bekerja dengan memperoleh tingkat upah yang lebih redah ini akan menarik perusahaan untuk lebih mempekerjakan mereka lebih banyak. Kriteria Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap system klasik sala satunya adalah tentang pendapatan yang

mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh.

Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi hanya dapat meningkatkan bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk pyang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow dimana dalam model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsi tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah memperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan buka sekedar pembagi. Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti: (a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan stok, dan (e) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan peranan sektor ekonomi dalam suatu daerah, sektor-sektor yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapat.

Pengeluaran Pemerintah

Rudy Badrudin menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja

perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan

pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263).

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan harus memperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang bekerja atau meningkatkan pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian justru melemahkan.

Hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana

transportasi dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2002, hal 170).

Metode penelitian

Model Analisis Ekonometrikra

Model ini untuk menganalisis factor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan, maka diuji regresi anatar indeks Williamson dengan jumlah penduduk, PDRB, Pengeluaran pemerintah.

$$Y = f (X_1, X_2, X_3) \text{ atau :}$$

Dalam menganalisis data pada peneltia ini penulis menggunakan data panel. Dimana data panel merupakan data campuran cross selection time series (Wahyu A. Pratomo, 2007). Penggunaan data panel didasarkan pada kenyataan

bahwa data yang tersedia, seriesnya tidak mencukupi untuk dilakukan. Model yang digunakan adalah :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu$$

Dimana :

Y_{it} : Pendapatan Antar kabupaten kota ke-i tahun 2012-2016

α : *Intercep/Dugaan* parameter

β_1 : Koefisien jumlah penduduk pada 5 (lima) Tahun 2012-2016

β_2 : Koefisien *Product Domestic Regional Broto* (PDRB) pada 5 (lima) Tahun 2012-2016

β_3 : Koefisien pengeluaran pemerintah pada 5 (lima) Tahun 2012-2016

X_{1it} : Jumlah penduduk pada 5 (lima) tahun 2012-2016

X_{2it} : *Product Domestic Regional Broto* (PDRB) atas dasar harga konstan pada 5 (lima) tahun 2012-2016

X_{3it} : Jumlah pengeluaran pemerintah daerah pada 5 (lima) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku tahun 2012-2016

μ : *Error/Term*

Hasil dan Pembahasan

Model ini untuk menganalisis adanya Pengaruh ketimpangan pendapatan, maka diuji regresi antara indeks Williamson dengan jumlah penduduk, PDRB,

Pengeluaran pemerintah, yang telah dituangkan pada rumusan masalah bahwa Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan antar Wilayah. Dan juga untuk digunakan untuk membuktikan hipotesis sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah bahwa diduga ada Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah secara signifikan Terhadap Ketimpangan Wilayah, Untuk membuktikan hipotesis tersebut, digunakan alat analisis regresi linear berganda. Dengan diperoleh persamaan regresi estimasi sebagai berikut (output lengkap lihat lampiran):

$$Y = 1,429463 + 0.041754 X_1 + -1.48E-05 X_2 + -0.000340 X_3 + \mu$$

t

$$F = 4,600477$$

$$R^2 = 0,346757$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan Antar Wilayah

X1 = Jumlah Penduduk

X2 = Product Domestic Regional Bruto

X3 = Pengeluaran Pemerintah

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu$$

Variabel Bebas	Koefisien Regresi (b _i)	Statistik T	P
Konstanta	1,429463	0,500400	0,6210
Jumlah Penduduk (X ₁)	0.041754	3,226431	0,0456
PDRB (X ₂)	-1.48E-05	-3,216270	0,4476
Pengeluaran Pemerintah (X ₃)	-0.000340	-2,415124	0,4526
Koefisien Determinasi R ² = 0,346757			
Statistik F = 4,600477 ; p = 0,010338			

Sumber: Data Panel (Diolah 2017)

Dilihat dari hasil regres tersebut maka interpretasinya sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk pada empat kabupaten dan satu kota madya mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan dengan koefisien sebesar 0.041754, artinya apabila jumlah penduduk pada naik sebesar 1%, cateris paribus maka tingkat ketimpangan antar kabupaten dan satu kota madya naik sebesar 0.041754%. Artinya, jumlah penduduk memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketimpangan yang cukup tinggi antar kabupaten kota.
2. PDRB perkapita Kabupaten dan kota madya mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan wilyah dengan nilai koefisien sebesar -1.4805 yang artinya apabila PDRB perkapita di

Tabel 4.7

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

empat kabupaten dan satu kota madya naik sebesar 1%, ceteris paribus maka ketimpangan antar wilayah mengalami penurunan sebesar -1.4805%, sesuai dengan studi Rapoparot (1999) yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi lokal berpengaruh negatif terhadap pesaran keuangan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat PDRB perkapita didasarkan pada pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini juga membuat PDRB berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar wilayah

3. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan wilayah di empat kabupaten dan satu kota madya dengan nilai koefisiennya sebesar -0.000340 yang artinya apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1%, ceteris paribus maka ketimpangan antar kabupaten dan satu kota madya mengalami kenaikan sebesar -0.000340%.

Kesimpulan

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Diperoleh koefisien regresi variable jumlah penduduk yang dinotasikan dengan (β_1) sebesar 1.36. Nilai koefisien variable Jumlah Penduduk (β_1) tersebut ternyata berpengaruh signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alfa) = 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Hal ini juga dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi dimana variable jumlah penduduk memiliki probabilitas sebesar $0.0057 > (\alpha=5\%)$.

Nilai koefisien Jumlah penduduk (X_1) sebesar 1.36 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara jumlah penduduk dengan Pendapatan wilayah pada lima di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi tingkat ketimpangan. Nilai koefisien jumlah penduduk (X_1) sebesar 1,36 memiliki arti jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen maka Pendapatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan meningkat sebesar 1,36 persen.

Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Diperoleh koefisien regresi variable Product Domestic Bruto (PDRB) yang

dinotasikan dengan (β_2) sebesar -3,14. Nilai koefisien variable PDRB (β_2) tersebut ternyata berpengaruh negative dan tidak signifikan secara statistic pada tingkat signifikansi α (alfa) = 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Hal ini juga dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai propabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi dimana variable PDRB memiliki propabilitas sebesar $0.027 > (\alpha=5\%)$,

Nilai koefisien PDRB (X2) sebesar -3,14 menunjukkan bahwa ada hubungan neegatife antara jumlah PDRB dengan Pendapatan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang artinya semakin tinggi PDRB maka semakin besar juga tingkat pendapatan. Nilai koefisien PDRB (X2) sebsar -3,14 memiliki arti jika PDRB meningkat sebesar 1 persen maka pendapatan wilayah pada lima kabupatenN naik sebesar 3,14 persen.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

koefisien regresi variable Pengeluaran Pemerintah yang dinotasikan dengan (β_3) sebesar -2.84. Nilai koefisien variable Pengeluaran Pemerintah (β_3) tersebut ternyata berpengaruh negative dan tidak signifikan secara statistic pada tingkat

signifikansi α (alfa) = 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Hal ini juga dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai propabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi dimana variable jumlah penduduk memiliki propabalitas sebesar $0.527 > (\alpha=5\%)$.

Nilai koefisiean Pengeluaran pemerintah (X3) sebesar -2,86 menunjukkan bahwa ada hubungan neegatife antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan pendapatan pada, yang artinya semakin tinggi Pengeluaran pemerintah maka semakin kecil tingkat ketimpangan pendaptan. Nilai koefisien Penegeluaran pemerintah (X3) sebsar -2,86 memiliki arti jika penegeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan pada kabupaten akan turun sebesar 2,86 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Astute, Esther Sri, Desentralisali Fiskal dan ketimpangan dearah di Indonesia, makro Ekonomi, Usahawan No. 02 2 Tahun 2007
- Anisa darma Yanti, Faktor – factor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan Antar Kabupaten kota di Propinsi Jawa Timur, Tahun 2012

- Ari Muliana, 2015, Pengaruh ketimpangan pembangunan antar wilayah terhadap kemiskinan di Indonesia
- Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku, Maluku Dalam angka, 2015 - 2016
- Deliarnov, 1995, Perkembangan Pemiiran Ekonomi, penerbit PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Hidaryati, R.A. 2008 Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten gresik. Jurnal Logos Vol 6
- Jhingan, ML. 2001. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta:PT. Raja Grifindo Persada
- Krisnantiya, 2014 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di privinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- Kuncoro Mudrajad, 2004, Otonomi dan Pemabangunan Daerah: Refomasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Penerbit, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat, Ekonomi Development, Analisis Jurnal Vol 5 2 May, 2010
- Lukman harun, Gozila Maski, 2011, Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di propinsi Jawa Timur
- Muhammad Arsyad, 2010, Pengeruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pemebangunan Manusia dan Belanja Langsung Terhadap Kemiskinan
- Mangkoesebroto, Guritno,1993, Ekonomi Publik, Edisi-iii, BPFE, Yogyakarta
- Marzuki, 2015, *Metodologi Riset Ekonisia*, Yogyakarta
- Mulyadi, 2003 pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan investasi terhadap jumlah Pengangguran di Kabupaten Greesik
- Sadono, Sukirno, 1994, Pengantar Teori Ekonomi, Edisi Kedua, Rajawali Perss. Jakarta.
- Sadono, Sukirno, 1999, Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyona. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung
- Sutarno, Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan Antara Kecamatan di Kabupaten Banyumas (2003)
- Sjafrizal, 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, 3 Maret
- Siti Parhal, Kontribusi desentralisasi Filkal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Tahun 2014
- Tasri,Evi susanti, kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Derah Tingkat II di propinsi Sumatra Barat Tahun 1985 – 2003
- Tadoro dan Smith, 2006, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dampak pada Pembangunan Ekonomi di Propivinsi Jawa Timur